

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PANITIAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Konsep Kewenangan	8
1.5.2 Wewenang Jaksa Pengacara Negara	13
1.5.3 Perselisihan Pemilihan Kepala Desa.....	14
1.5.4 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Tipe Penelitian	17
1.6.2 Pendekatan Masalah	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	19
1.7 Sistematika Penulisan.....	20

BAB II	KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA MEWAKILI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
	2.1. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara	21
	2.1.1. Teori Kewenangan	21
	2.1.2. Wewenang Jaksa Di Bidang Tata Usaha Negara	28
	2.2. Kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa	39
BAB III	SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA	
	3.1. Sengketa Pemilihan Kepala Desa	47
	3.1.1. Pemilihan Kepala Desa	47
	3.1.2. Tahapan Pemilihan Kepala Desa	50
	3.1.3. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa	56
	3.2. Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara.....	57
	3.2.1. Keputusan Tata Usaha Negara	57
	3.2.2. Karakteristik Sengketa Tata Usaha Negara.	67
	3.3. Beberapa Putusan Sengketa Tata Usaha Negara.....	75
	3.3.1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 52/B/2012/PT.TUN.SBY atas nama Agus Yahya.....	75
	3.3.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.49/G/2015/PTUN.PBR atas nama Penggugat Susantoni Alwi	79
	3.3.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 172/G/2017/PTUN. MTR atas nama Penggugat Islah el Wathan.....	83
BAB IV	PENUTUP	
	4.1. Kesimpulan.....	87
	4.2. Saran.....	88

DAFTAR BACAAN